

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era teknologi dan globalisasi, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan yang berhubungan dengan masalah kecurangan. Kolusi, nepotisme, dan penggelapan lainnya, sehingga dalam proses verifikasi secara objektif yang terdokumentasi secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, kondisi, sistem atau informasi tersebut sesuai dengan kriteria audit, serta menkomsumsikan hasil proses tersebut kepada klien.

Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Jasa tersebut terdiri atas atestasi dan jasa non atestasi. Jasa atestasi dapat berupa jasa audit umum atas laporan keuangan dan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas informasi keuangan performa dan review atas laporan keuangan. Sedangkan jasa non atestasi yang diberikan mencakup akuntansi keuangan, manajemen, komplikasi, perpajakan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik.¹

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Seorang auditor juga harus mampu untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*mistatement*) baik yang disebabkan oleh

¹ Eva Ulfa Rahayu. **Dampak UU Akuntan Publik terhadap perkembangan profesi pendidikan akuntansi dan gelar CPA di Indonesia**

kekeliruan atau kecurangan (*fraud*) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Menurut standar audit, faktor yang membedakan kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja. Tugas auditor adalah memeriksa laporan keuangan tersebut sehingga pemakai laporan keuangan akan percaya bahwa laporan keuangan tersebut tidak akan menyesatkan mereka.

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan. Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan auditor independen pada kantor akuntan publik (KAP).

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah kasus PT Garuda Indonesia. Dimana dalam kasus ini, informasi laba yang disajikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. PT Garuda Indonesia terbukti melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi laba pada periode tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairil Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi dengan PT Garuda Indonesia masih merupakan kontrak jasa dan belum di realisasi. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum

dibayarkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Dalam hal kasus tersebut Kemenkeu menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan Polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Untuk tahun Buku 2018. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited Kepada KAP Tanubrata, Sutanto, fahmi, Bambang & Rekan .

Auditor bertanggung jawab memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh institusi keuangan, apakah sudah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan tergantung pada hasil penilaian akuntan publik. Kata “wajar tanpa pengecualian“, yang menjadi pendapat akuntan publik, mengandung makna bahwa informasi yang diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan.

Keputusan yang utama harus ditetapkan oleh setiap auditor adalah menyangkut banyaknya bukti pendukung yang memadai untuk dikumpulkan. agar ia merasa yakin bahwa unsur unsur laporan keuangan dan semua laporan lainnya dari klien dibuat secara wajar. Banyak nya bukti yang harus dikumpulkan dalam suatu pemeriksaan tertentu merupakan proses pengambilan keputusan diantara proses tersebut yang paling adalah proses pemeriksaan. Memperoleh Bukti yang terlalu sedikit akan memperbesar kemungkinan kegagalan kesalahan yang material. Belakangan ini perhatian auditor diarahkan terutama untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dan transaksi kecurangan. Melalui penetapan kebijakan dan fungsinya lebih kepada mendeteksi dan melindungi, tidak ada standar formal yang ditetapkan

untuk menentukan tanggung jawab seorang auditor untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Dalam mendeteksi terjadinya kecurangan, Seorang auditor haruslah memiliki sikap independensi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor .

Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalnya, Sekalipun auditor dibayar oleh perusahaan atau klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang handal.

Independensi auditor berhubungan dengan obyektivitas, guna meningkatkan tingkat kehandalan laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kewajaran informasi yang di dalam laporan keuangan, perlu adanya suatu pemeriksaan yang independen. Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan temuan hanya berdasarkan bukti yang ada, auditor diasumsikan memiliki independensi, baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan audit agar dapat memberikan pendapat (opini) audit secara objektif. Hal ini agar pemeriksaan tersebut independen dan tidak memihak.

Sikap profesionalisme merupakan sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang auditor. Dengan adanya sikap ini, maka seorang auditor dapat memiliki wawasan yang luas terhadap kompleksitas suatu perusahaan atau organisasi profesionalisme kecurangan karena auditor dapat memberikan opini yang objektif, tidak bias dan tidak dibatasi. Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor semakin terjamin. Untuk menjalankan peran yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas kompleksitas organisasi yang modern.

Pada penelitian ini mengambil sampel penelitian adalah auditor yang ada di kantor akuntan publik dan penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yaitu independensi auditor dan profesionalisme auditor. Penggunaan kedua variabel

tersebut dirasa perlu mengingat upaya auditor untuk dapat mendeteksi kecurangan. Dengan Begitu Independensi dan profesionalisme auditor akan meningkat sehingga akan meningkatkan upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pada penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data menyebarkan kuesioner kepada auditor dengan objek penelitian di beberapa kantor akuntan publik yang ada di Jakarta

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Independensi dan profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud* studi kasus pada beberapa kantor akuntan publik di Jakarta** “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Diatas, Masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* ?
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* ?

1.3. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor dalam mendeteksi *fraud*
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud*

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Manfaat secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi KAP khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi dan profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud* sehingga dalam mendeteksi terjadinya kecurangan yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat

2. Manfaat Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang lebih luas dan dapat memberikan pengetahuan tambahan terutama yang menyangkut penelitian mengenai pengaruh independensi dan profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud*, dan dapat juga sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Independensi Auditor

2.1.1. Pengertian Independensi

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata "*independence*" yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus Oxford Advance learner's Dictionary of Current English terdapat entri kata "*independence*" bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda) tidak mendasarkan diri pada orang lain bertindak.

Menurut Wiguna (2010) definisi independensi, yaitu :

"Independensi merupakan sikap yang perlu diupayakan agar dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan walaupun dalam pelaksanaannya auditor dibayar oleh klien, auditor harus tetap memiliki kebebasan dalam pelaksanaan audit dan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakaian laporan keuangan atau tidak memanipulasi hasil audit."²

Menurut Eric (1975) dan Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi adalah:

"Independensi sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikannya hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan

² Ida Ayu Indira Biksa, et. **Al Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor pada Deteksi Kecurangan**, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 17.3, Desember 2016

aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya”³

2.1.2. Pengertian Independensi Auditor

Menurut pendapat Moller (2005) menyatakan bahwa independensi auditor,

yaitu :

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari konflik kepentingan signifikan yang mengancam objektivitas dimana ancaman akan objektivitas tersebut harus dikelola pada level individu maupun level organisasi”⁴

Konsep independensi ada dua penggal yaitu (1) independensi dalam penampilan terhadap umum, seperti yang ditunjukkan oleh ketaatan terhadap norma- norma atau kaidah-kaidah yang obyektif yang menguraikan hubungan- hubungan tertentu, dan (2) independensi dalam sikap mental, yang merupakan kondisi kejiwaan dan suatu manifestasi dari integritas yang hanya mendapat tantangan karena suatu sebab tertentu.

Menurut Mulyadi (2008) bahwa independensi auditor yaitu :

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam dari auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam dari auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”⁵

³ Marcellina Widiyastuti, et.al **Pengaruh kompetensi independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan**,Vol.5,No.2,Maret 2009

⁴ Rapina,et.al **Pengaruh Independensi eksternal audit terhadap pelaksanaan audit**.Akrual Jurnal Akuntansi No2 Tahun Ke 1,Mei-Agustus 2010

⁵ Lauw Tjun Tjun, et.al **Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit** ,Jurnal Akuntansi Vol.4 No 1, Mei 2012

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya.

Menurut Mulyadi (2002) dalam kenyataannya auditor sering kali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut :⁶

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

⁶ Rosliana, **Pengaruh pengalaman, due profesional care dan independensi terhadap kualitas audit.** Jurnal Akuntansi dan keuangan. Vol. 4 No.1. Januari-Juni 2015

Jadi auditor yang independen itu harus bebas dari bujukan, pengaruh, atau pengendalian klien atau dari siapa pun juga yang punya kepentingan dengan audit. Dan jika auditor mengikuti kemauan klien yang berlawanan dengan pertimbangannya sendiri, maka pendapat yang dikemukakan auditor itu tidak ada artinya.

2.1.3. Macam-macam Independensi dalam auditing

Hekinus Manao dalam filosofi auditing BPKP (2007) dalam Indah Mutiara(2010) mengungkapkan ada tiga macam independensi dalam auditing, yaitu ⁷:

1. Independensi program
2. Independensi investigasi
3. Independensi pelaporan

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari independensi program, independensi investasi, dan independensi pelaporan.

1. Independensi program

Independensi program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan kendali pihak manapun, termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan ruang lingkup, prosedur audit, dan teknik audit yang digunakan.

2. Independensi investigasi

⁷ Ainur Fatwa, **Pengaruh profesionalisme, independensi, etika profesi dan pengalaman terhadap kualitas audit**, 2019

Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau kendali pihak lain dalam melakukan aktivitas pembuktian, akses sumber data, dukungan teknis pengujian fisik dan perolehan keterangan/informasi dari pihak manapun.

3. Independensi pelaporan

Independensi pelaporan adalah kebebasan auditor tanpa pengaruh dan kendali dari pihak lain dalam mengemukakan fakta hasil pengujian, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil audit.

2.1.4. Pentingnya Independensi

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa sikap independensi auditor ternyata berkurang. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai seorang yang independen.

Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang

diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukan sebagai anggota direksi. Demikian juga halnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang di auditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Namun bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independennya.

Independensi merupakan salah satu ciri paling penting yang dimiliki oleh profesi akuntan publik, karena banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan kepada kebenaran laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang dibuat oleh akuntan publik. Sekalipun akuntan publik ahli, apabila tidak mempunyai sikap independensi dalam mengumpulkan informasi akan tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak biasa. Akuntan publik harus bersikap independen jika melaksanakan praktik publik.

2.1.5. Gangguan dalam independensi

Menurut Generally Accepted Governmental Auditing (GAGAS) (2003:29) ada tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu sebagai berikut :⁸

⁸ Shinta Utami, **Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengetahuan dalam**

1. Gangguan pribadi
2. Gangguan ekstern
3. Gangguan organisasi

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari gangguan organisasi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi.

1. Gangguan pribadi

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain :

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.

- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yangdiperiksa.
- e. Memiliki tanggungjawab untuk mengatur suatu entitas atau kepastian yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau programyang diperiksa keputusan entitas atau program yang diperiksa. Misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnyadari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan,pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa. Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya gangguan terhadap independensinya, gangguan tersebut harus diselesaikan secepatnya.

Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seseorang pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan meminta pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa dapat diminta

melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikut sertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut.

2. Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independen dan obyektif pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat :

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.
- e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif

terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.

- f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
- g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
- h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksa. Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan dan melaporkan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan secara obyektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tertentu.

3. Gangguan organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas ia bekerja.

Jadi, ada beberapa gangguan pada independensi auditor, dari semua gangguan ini sangat mempengaruhi jalannya proses audit, selain itu kepercayaan masyarakat dalam ke independensian auditor.

2.1.6. Ancaman dalam Independensi

Ada 5 ancaman dalam independensi, ancaman terhadap independensi dapat berbentuk

:

1. Kepentingan diri
2. *Review* diri
3. Advokasi
4. Kekerabatan
5. Intimidasi

Dibawah ini adalah penjelasan tentang 5 ancaman dalam independensi Auditor.

1. Kepentingan Diri

Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk Akuntan Bisnis (namun tidak terbatas pada hal-hal berikut), antara lain :

- a. Kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi.
- b. Perjanjian kompensasi insentif.
- c. Penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat.
- d. Tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan

2. *Review* Diri

Ancaman *review* diri dapat timbul jika pertimbangan sebelumnya

dievaluasi ulang oleh akuntan profesional yang sama telah melakukan penilaian sebelumnya tersebut. Contoh ancaman review diri untuk Akuntan Publik antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang.
- b. Pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut.
- c. Terlibat dalam pemberian jasa pencatatan akuntansi sebelum perikatan penjaminan.
- d. Menjadi anggota tim penjaminan setelah baru saja menjadi karyawan atau pejabat di perusahaan klien yang memiliki pengaruh langsung berkaitan dengan perikatan penjaminan tersebut.
- e. Membatasi jasa kepada klien yang berpengaruh langsung pada materi perikatan penjaminan tersebut

3. Advokasi

Ancaman advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas dapat dikompromikan. Contoh langsung ancaman advokasi untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. Mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit.
- b. Bertindak sebagai pengacara (penasehat hukum) untuk klien penjamin dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga

4. Kekerabatan

Ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut.

Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien.
- b. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan.
- c. Mantan rekan (*partner*) dari kantor akuntan yang menjadi direktur atau pejabat klien atas karyawan pada posisi yang berpengaruh atas pokok suatu penugasan.
- d. Menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya tidak signifikan.
- e. Hubungan yang terjalin lama dengan karyawan senior perusahaan klien

5. Intimidasi

Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. Diancam, dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan

penugasan pada klien.

- b. Diancam dengan tuntutan hukum.
- c. Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi *fee*.

2.1.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi

Menurut Shockley (1981) dalam Ana Wulandari (2013) ada 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu :

1. Lama hubungan dengan klien (*audit tenure*)

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntansi publik. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk kantor akuntan publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Adapun penjelasan perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut: penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien.

2. Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Selain itu, persaingan antara kantor akuntan publik (KAP) semakin besar. KAP semakin bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan pertumbuhan KAP. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Sehingga KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien baru dan KAP enggan melepas klien yang sudah ada. Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien Knapp (1985) dalam Ana Wulandari (2013). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi

keuangan baik relatif kecil. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai mengenal pekerjaan dan operasi kantor akuntan publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan.

Oleh karena itu pekerjaan akuntansi publik dan operasi kantor akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga *output* yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. *Peer review* sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. *Peer review* dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik yang di *review* dan auditor yang dalam tim *peer review*. Manfaat yang diperoleh dari *peer review* antara lain mengurangi risiko litigasi, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja,

memberikan *competitive advantage* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

4. Jasa Non Audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan. Kusharyanti (2002) dalam Ana Wulandari (2013). Adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.

Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian. Barkes dan Simnet (1994) dalam Ana Wulandari (2013). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut.

2.1.8. Indikator Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.

Menurut Abdul Halim (2008) bahwa independensi, yaitu :

“Suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit, bahwa sikap independensi harus jujur dalam diri dan tidak memihak dalam melakukan audit.”⁹

Menurut Donald dan William (1982) dalam Ratna Ningsih (2012) independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu :¹⁰

- A. Independensi dalam fakta berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya serta adanya kedudukan dan jabatan yang tidak sesuai dalam perusahaan.
- B. Independensi dalam penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertindak bebas atau independen, sehingga auditor menyenangkan harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Dari berbagai pendapat mengenai independensi diatas, terdapat satu

⁹ Ilham Syarif. **Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit**, Skripsi. Fakultas ekonomi dan bisnis ,Universitas Muhamadiyah Surabaya,2015

¹⁰ Asep Irfan Danny. **Pengaruh profesionalisme dan independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas salah saji laporan keuangan instansi pemerintah**. 2015

kesepakatan bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor. Terdapat berbagai jenis independensi, tetapi dapat disimpulkan bahwa independensi yang dapat dinilai hanyalah independensi yang kelihatan. Dan penilaian terhadap independensi yang kelihatan ini selalu berkaitan dengan hubungan yang dapat dilihat serta diamati antara auditor dan kliennya.

2.2. Pengertian Profesionalisme Auditor

2.2.1. Pengertian Profesionalisme

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar bakudi bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Lekatompessy (2003) dalam Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012).

Pengertian profesionalisme yang baku menurut kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2005) yaitu kata profesionalisme berasal dari kata profesiyang mempunyai arti “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.” Pengertian profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli

dibidangnya atau profesional.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008) definisi profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Jadi, ada beberapa kriteria untuk menjadikan seorang auditor itu menjadi profesional, seorang auditor juga harus mentaati standar yang ada dan tidak memihak pada suatu klien. Serta harus bertanggungjawab atas laporan-laporan yang disajikan.

2.2.2. Pengertian profesionalisme auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008) definisi profesionalisme auditor, yaitu :¹¹

“Profesionalisme auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Adapun persyaratan profesionalisme auditor menurut Standar Profesi Akuntan Publik (2011) bahwa :

“04 Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah

¹¹ Lani Octavia Nuralifah. **Pengaruh sikap profesionalisme dan independensi auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan studi kasus pada auditor di kota bandung yang terdaftar di BPK.**, Fakultas ekonomi, Universitas Komputer Indonesia

orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkelahiran dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenalar barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasehat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum. “05 Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.

“06 Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Komptemen Akuntan Publik.”

Jadi, dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik dibidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

2.2.3. Ciri-ciri Profesionalisme Auditor

Menurut Mulyadi (2008) seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”.

Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.

2. Meningkatkan dan memelihara “imej profesional”.

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang diembannya. Dalam hal ini akan muncul

rasa percaya diri akan profesi tersebut.

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar bakudi bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

2.2.4 Indikator Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Ratna Ningsih (2012) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku, terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian sosial

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.3. Kecurangan

2.3.1. Pengertian Kecurangan

Secara umum, Kecurangan merupakan sikap setiap tindakan ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Didalam konteks Akuntansi, Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja

Menurut Association Of Certified fraud examiners (ACFE)

“ Kecurangan Sebagai tindakan penipuan, tipu daya, kelicikan, mengetahui dan cara tidak jujur lainnya, yang dibuat seseorang atau badan serta dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain “.¹²

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja atas laporan keuangan. Dilakukan untuk mendapat keuntungan dengan cara penipuan, tipu daya, kelicikan, mengetahui dan cara tidak jujur lainnya, kecurangan pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan memanfaatkan kesempatan yang ada. Semua kecurangan yang terjadi dalam perusahaan ataupun organisasi perlu untuk dideteksi oleh auditor, karena kecurangan dapat menyebabkan kerugian.

2.3.2. Jenis Jenis kecurangan

Terdapat dua jenis utama kecurangan, yaitu :

A. Kecurangan Laporan keuangan (*Financial statement fraud*)

Kecurangan dalam laporan keuangan adalah salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau dengan sengaja melakukan pengungkapan untuk mengetahui pemakai laporan keuangan tersebut. Penghapusan terhadap jumlah dilakukan perusahaan dengan lebih sajikan pendapatan dengan menghapus utang dagang dan liabilitas lainnya. Pada perusahaan yang nonpublik, hal

¹² Trinanda Hanum Hartan, **Pengaruh Skeptisme profesional, independensi dan kompetensi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.** Skripsi, fakultas ekonomi Universitas negeri Yogyakarta, 2016

ini dilakukan untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan juga dapat dengan sengaja mengurangsajikan pendapatan ketika labanya tinggi untuk menciptakan cadangan laba yang dapat digunakan untuk menaikkan laba kemudian hari. Praktik ini dikenal dengan istilah manajemen laba dan “perataan laba”.

B. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan Aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset yang dimiliki suatu entitas. Penyalahgunaan aset sering digunakan untuk mengacu pada penurunan yang dilakukan oleh pegawai dan pihak internal dalam suatu organisasi. ACFE memperkirakan rata-rata perusahaan merugi sebesar 6% dari pendapatannya yang disebabkan oleh kecurangan. Meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak eksternal

2.3.3. Konsep Segitiga Kecurangan (*fraud Triangle*)

Terdapat 3 (tiga) faktor pendorong seorang melakukan kecurangan. Secara umum kecurangan mempunyai tiga sifat seperti yang diungkapkan dalam *fraud triangle* (Suradji, 2007 dan Tuanakotta 2007). Dimana kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu :

1. Tekanan (*Pressure*)

Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum, atau mempunyai

tujuan yang tidakrealistik.

2. Peluang (*Oppurtunity*)

Untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek. Umumnya, Manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Salah Satu elemen terjadinya fraud yaitu rasionalisasi, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (*Skouses et al., 2009*). Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan *fraud*. Penentu utama dari kualitas laporan keuangan yaitu integritas manajemen



Gambar 2. 1 *fraud triangle*

2.3.4. Mendeteksi *fraud*

Kurangnya pengetahuan auditor dan pemahaman atas *fraud* sering terjadi dan prosedur yang efektif untuk mendeteksi penipuan membuat seorang auditor kesulitan melakukan tugasnya.

Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan sedikit sulit. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung.

Petunjuk adanya kecurangan (*fraud*) biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) misalnya, adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (Fraud Indicators)*. Timbulnya *red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi.

Peyimpangan fisik properti, akses ke catatan akuntansi, dan pengetahuan atau otoritas untuk menolak pengendalian adalah kandungan utama dari kecurangan dalam buku besar dan laporan keuangan. Menurut Bologna, juga ada beberapamotif kecurangan lain, diantaranya adalah :

a. Motif Egosentris

Motif ini untuk kecurangan yang berasal dari fakta bahwa penipu berusaha untuk menunjukkan bahwa ia lebih tinggi daripada orang

lain, lebih tinggi dalam arti dia cukup baik untuk mengejutkan dan membingungkan orang lain, dan bahwa ia dapat memanipulasi buku besar tanpa diketahui atau dideteksi.

b. Motif Ideologis

Penipu ideologis dapat melakukan kecurangan untuk memberikan protes yang kuat atas sesuatu atau yang akan terjadi.

c. Motif Psychotis

Penipu *psychotis*, seperti ‘perpetual con-men’ dan ‘*kleptomanics*’, melakukan kejahatan mereka diluar kewajiban atau obsesisi

2.3.5 Tujuan Mendeteksi *fraud*

Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) (2008) terdapat tujuan mendeteksi *fraud* yaitu untuk mengetahui :

- A. Bahwa Kecurangan telah terjadi
- B. Apakah perusahaan ataupun organisasi menjadi korban atau sebagai pelakukecurangan
- C. Adanya kelemahan dalam pengendalian internal serta moral pelaku yangmenjadi penyebab terjadinya kecurangan
- D. Adanya kondisi lingkungan perusahaan ataupun organisasi

2.3.6. Langkah-langkah auditor mendeteksi *fraud*

Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan auditor untuk *fraud* adalah dengan cara mendeteksinya. Berbagai teknik dapat diterapkan, seperti yang dikutip dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,2000), yaitu:¹³

A. *Critical* atau *Key Point Auditing*

Critical point auditing adalah suatu teknik dimana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Keberhasilan untuk dapat mendeteksi *fraud* tergantung pada 3 (tiga) faktor:

1. Besarnya organisasi dan jumlah transaksi, catatan yang tersedia untuk diperiksa.
2. Jumlah item yang diperiksa.
3. Jumlah kecurangan yang terjadi.

B. Analisis Kepekaan Pekerjaan

Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi memiliki berbagai peluang atau kesempatan untuk terjadinya *fraud*. Teknis analisis pekerjaan (*job sensitivity analysis*) ini pada prinsipnya didasarkan pada asumsi berikut,

¹³ Herty Safitri Yunintasari , **Pengaruh independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud**.Skripsi, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, Universitas islam negeri syarif hidyatullah jakarta.2010

yaitu jika seseorang karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang atau tindakan negatif (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukan.

Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisa dengan memandang “pelakupotensial”. Sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya fraud dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pemeriksaan intern pada posisi yang rawan *fraud*.

Dalam buku Diktat Perjenjangan Auditor Ketua Tim yang diterbitkan oleh BPKP (2000), menyebutkan bahwa pendekatan audit bertujuan untuk menyelidiki *fraud* atau *forensic* mungkin melibatkan empat hal berikut ini:

- A. Menganalisa data yang tersedia,
- B. Menyusun hipotesis,
- C. Uji hipotesis, dan
- D. Menyaring dan memperbaiki hipotesis.

Beberapa langkah yang diperlukan untuk melakukan uji *fraud* adalah sebagaiberikut:

- A. Pengujian Dokumen,
- B. Para saksi pihak ketiga yang netral,
- C. Nyata,
- D. *Co-Conspirators*,

E. Target Penyingkapan *Fraud*.

Audit dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut (SAS No.99):

- A. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangandan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan.
- B. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
- C. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan .
- D. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan .
- E. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun.
- F. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan .

Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah:

1. Respon bahwa resiko kecurangan memiliki efek pada bagaimana audit akandilaksanakan.

2. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan.

3. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan .

G. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi:

1. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit.

2. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantif atau review keseluruhan tahap audit yang mengidentifikasi tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan (*fraud*).

3. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan.

H. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

I. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi tersebut dalam bentuk:

1. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan audit dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.

2. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan.

3. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut.
4. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu.
5. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut diatas, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Herty Safitri Yuninta Sari (2010)	Pengaruh Independensi dan Profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan	Variabel Dependen: Independensi dan Profesionalisme	Hasil Uji statistik t, menyatakan bahwa variabel Independen menunjukkan

		mendeteksi terjadinya <i>fraud</i>	Variabel Independen: Mendeteksi <i>fraud</i>	hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Independensi dan profesionalisme auditor.
2	Herman karamoy dan Heince R. N. Wokas	Pengaruh Independensi dan profesionalisme, dalam mendeteksi <i>fraud</i> pada auditor internal Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Dependen : Independensi dan Profesionalisme Variabel Independen : Mendeteksi <i>fraud</i>	Dalam mendeteksi Kecurangan (<i>fraud</i>) akan dipengaruhi oleh Profesionalisme seorang auditor sedangkan variabel independensi tidak signifikan bagi auditor internal di Inspektorat Sulawesi Utara
3	Lingga Sulistyowati (2014)	Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, Independensi, dan profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan	Variabel Dependen : Pengalaman, Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Variabel Independen : Pendeteksian Kecurangan	Variabel Independen yang berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan adalah profesionalisme dan kompetensi sedangkan Variabel Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan
4	Tamara, venny (2020)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan profesionalisme auditor dalam	Variabel Dependen : Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme	Kompetensi tidak mampu mendukung auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> .

		mendeteksi <i>fraud</i>	Variabel Independen : Mendeteksi <i>fraud</i>	Indepedensi mampu mendukung auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> Profesionalisme mampu mendukung auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> . Kurang nya Kompetensi yang di nilai pengalaman dan kemampuan atau keahlian auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> menyebabkan hasil hasil audit yang didapatkan Kurang berkualitas
--	--	----------------------------	--	---

Sejalan dengan penelitian terdahulu di atas, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan Herty Safitri Yuninta Sari (2010) sebagai acuan dalam penelitian ini. Penulis ingin menguji kembali bagaimana pengaruh Indepedensi dan Profesionalisme dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaannya adalah, penelitian ini menjadikan kantor akuntan publik di Jakarta sebagai objek penelitian.

2.5. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

Kerangka berpikir dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang diteliti, berdasarkan batasan, rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada auditor kantor akuntan publik

,penerapan sikap independensi dan profesionalisme harus efektif dalam mendeteksi kecurangan .

2.5.1. Pengaruh independensi auditor dalam mendeteksi *fraud*

Independen berarti auditor tidak dapat dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga pada kreditor dan pihak lain yaitu masyarakat dan pengguna laporan keuangan yang lainnya yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor.

Jika seorang auditor tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mendeteksi terjadinya *fraud*. Oleh sebab itu, profesi auditor akan sangat sensitif terhadap masalah independensi. Dengan demikian sikap independensi sangat dibutuhkan agar laporan keuangan yang disajikan oleh manajer dapat berkualitas dan berkredibilitas dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* yang ada.

Independensi auditor menurut Herty Safitri Yuninta Sari (2010) bahwa Independensi Auditor berpengaruh positif signifikan dalam upaya Mendeteksi terjadinya *Fraud*.

H₁ : Independensi berpengaruh positif signifikan dalam mendeteksi

fraud

2.5.2. Pengaruh Profesionalisme Auditor Dalam Mendeteksi *fraud*

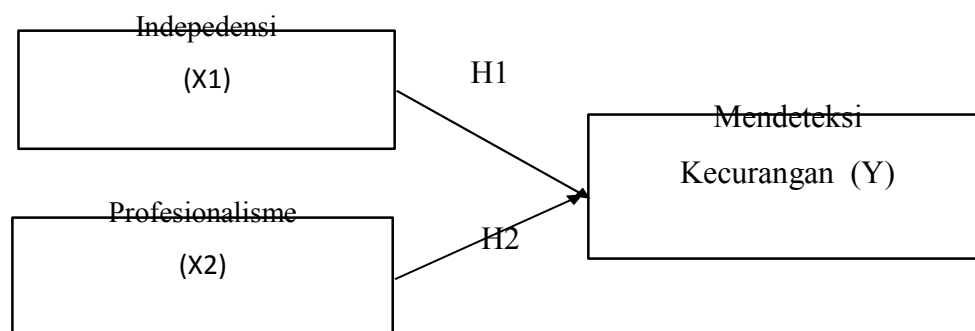
Dalam upaya mendeteksi terjadinya *fraud* membutuhkan kinerja dan tindakan profesional dari auditor karena tidak mungkin *fraud* bisa dideteksi jika auditor tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya secara profesional.

Profesionalisme auditor menurut penelitian Herty Safitri Yuninta Sari (2010) berpengaruh positif signifikan dalam upaya mendeteksi terjadinya *Fraud*. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis

H₂ : Profesionalisme berpengaruh positif auditor dalam mendeteksi Kecurangan

2.5.3. Kerangka Pemikiran

Untuk menyerderhanakan kerangka berpikir yang dijelaskan diatasmaka dibuatlah kerangka berpikir pada gambar ini



Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digolongkan kedalam penelitian kuantitatif kolerasional yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam menguji hubungan antar variabel. Menurut Soeratno dan Lincolin (1988) dalam buku Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis jika serangkaian observasi (pengukuran) dapat dinyatakan dalam angka-angka hasil observasi tersebut dinamakan data kuantitatif.¹⁴

Berdasarkan sumber datanya penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Umumnya data dari sumber primer selalu dianggap lebih baik daripada data dari sumber sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, data primer umumnya bersifat lebih terperinci daripada data sekunder. Istilah-istilah dan unit pengukuran yang digunakan dalam data primer selalu dirumuskan secara lebih sempurna dan prosedur serta bentuk daftar yang digunakan dalam pengumpulan datanya seringkali dilampirkan bersama data yang diterbitkan.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kantor akuntan publik yang ada di Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tentang kecurangan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris Pengaruh independensi auditor dan profesionalisme auditor dalam mendeteksi Kecurangan.

¹⁴ Soeratno dan Lincolin, **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**, edisi revisi, penerbit sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, Bulaksumur, 1988, Hal 63

3.3. Populasi dan Sampel penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008). ¹⁵Populasi dalam penelitian ini adalah auditor senior yang bekerja di Beberapa kantor akuntan publik di Jakarta Berjumlah 73 orang. Menurut Nazir, sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti. ¹⁶Sampel dalam penelitian ini adalah auditor senior yang bekerja di beberapa Kantor Akuntan Publik di Jakarta . Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Judgement Sampling*. *Judgement sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Tabel 3.1

Daftar Kantor Akuntan Publik di Jakarta

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
1.	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
2.	KAP Ojak Lumban Gaol
3.	KAP Imelda & Rekan
4.	KAP Jeptha, Nasib & Junihol
5.	KAP Drs. Albert Silalahi & Rekan
6.	KAP Nexia KPS
7.	BDO Indonesia
8.	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

3.4. Teknik pengumpulan Data

¹⁵ Aviani Sanjaya (2017). Pengaruh Skeptisme profesionalisme, indepedensi, kompetensi, Pelatihan auditor, dan resiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi Kecurangan. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol 15 No.1

¹⁶ Moh Nazir, **METODE PENELITIAN**, Edisi ketujuh, penerbit : Ghalia Indonesia, Bogor,2011, Hal 2.71

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Prosedur ini sangat penting agar dapat yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan Teknik pengumpulan data angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait topik yang diteliti. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut Soeratno dan Locolin dalam buku Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis kuesioner atau angket merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Kuesioner yang disebar berupa kasus dan pertanyaan kepada responden mengenai masalah yang terkait dengan objek yang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer merupakan kuesioner yang disebar kepada responden dengan cara melalui bantuan google formulir dikarenakan pandemi Cov-19, dan kuesioner itu berupa pertanyaan untuk variabel Independensi dan profesionalisme auditor dalam mendeteksi *fraud*.

3.5. Definisi Operasional variabel

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen . Operasional untuk pengujian hipotesis yang dilakukan adalah Variabel independen atau variabel yang sering disebut dalam variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Independensi auditor dan Profesionalisme auditor

1. Independensi Auditor

Menurut Mautz dan Sharaf dalam M. Tuanakota (2011) , Menyatakan Bahwa :

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan “.

2. Profesionalisme Auditor

Menurut Arens (2011) Menyatakan profesionalisme auditor adalah bertanggungjawab untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Independensi

Variabel	Konsep variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran

Independensi auditor (x₁)	Independensi mencerminkan sikap tidak memihak sertatidak dibawah pengaruh dan tekanan tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan . Mautz dan Sharaf dalam Teodorus M. Tuanakota (2011)	Jenis jenis independensi :	- Bebas dari tekanan manajerial Bebas dari intervensi ataupun atau dari sikap tidak kooperatif	Likert
		1. <i>Programmig independence</i> (independensi penyusunan program)		
		2. <i>Investigative Independence</i> (Independensi investigasi)	- Akses langsung atas seluruh buku dan suber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan - Bebas dari upaya pimpinan	Likert
		3. <i>Reporting Independence</i> Sumber : R. K. Mautz dan sharaf dalam Theorudus M. Tuanakota (2011:64)	- Menghindari praktik untuk mengelurakan hal hal penting dari Laporan Formal - Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas	Likert

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel Profesionalisme

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
	Profesionalisme auditor adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat Arens yang Diahlibahasaka	3. Pengabdian pada profesi 4. Kwajiban sosial 3. Kemandirian	A. Profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme B. Profesi menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki A. Pentingnya peranan profesi B. Manfaat profesi bagi masyarakat C. Profesional karena adanya pekerjaan A. Kemandirian seseorang yang profesional	Likert

			B. Auditor mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan	
		4. Keyakinan terhadap keyakinan profesi	A. Yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi B. Orang luar yang tidak mempunyai kompetensi tidak berhak menilai	Likert
		5. Hubungan dengan sesama profesi	A. Auditor menggunakan ikatan profesi sebagai acuan B. Auditor menggunakan organisasi formal sebagai ide utama	Likert

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel Mendeteksi kecurangan

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>) (Y)	Mendeteksi kecurangan adalah Upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus	Upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan :	Melakukan pengujian dan pelaksanaannya secara acak dan mendadak	Likert
		1. Pengujian Pengendalian intern		
		2. Audit keuangan atau operasional	- Dapat merancang audit untuk mendeteksi kecurangan - Auditor harus melaksanakan audit	

mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika perilaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit). Kumaat (2011)	3. Pengumpulan informasi dengan teknik elisitasi	- Auditor mencari informasi pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan - Mendeteksi dengan teknik elisitas terhadap gaya hidup, dan informasi lain tentang orang yang sedang dicurigai	Likert
	4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur	- Auditor menggali informasi mengenai pengendalian intern yang tidak dilaksanakan - Auditor harus mampu mengungkapkan transaksi-transaksi yang janggal - Auditor dapat mencari tahu tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun - Auditor mendeteksi sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis	Likert
	5. Kaji ulang terhadap Penyimpangan dalam kinerja operasi	- Auditor memperoleh Penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja tujuan dan sasaran organisasi	Likert
	6. Pendekatan reaktif Sumber : Karyono (2013)	Auditor reaktif terhadap pengaduaan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan institusi atasan	Likert

Sumber : Penelitian terdahulu

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, dimana sub variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument berupa

pertanyaan. Skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel yaitu 5 tingkatan, bergerak dari satu sampai lima.

Skor 5 Untuk menjawab sangat setuju (SS)

Skor 4 untuk menjawab setuju (s)

Skor 3 untuk menjawab kurang setuju (KS)

Skor 2 untuk menjawab tidak setuju (TS)

Skor 1 Untuk menjawab Sangat tidak Setuju (STS)

3.6. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan layak atau tidak dalam penelitian, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis.

3.6.1. Uji Validitas

Menurut Punaji Setyosari (2010) suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur, artinya instrument itu dapat mengungkap data dari variabel yang dikaji secara tepat¹⁷.¹⁷ Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor item dengan skor total item. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu intern yang digunakan dilakukan uji signifikansi koefisiens korelasi pada taraf signifikan 0,5 artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor totalnya. Untuk melaksanakan uji validitas ini, dapat menggunakan teknik analisis korelasi *bivariate person*. Koefisien korelasi item-item total dengan *bivariate person* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i) (\sum x)}{[n \sum i^2 - (\sum i)^2 - \sum x^2]}$$

¹⁷ Punaji Setyosari, **Metode apenelitian Pendidikan Pengembangan**, Penerbit Kencana, 2010, Hal 185

Dimana :

r_{ix} = Koefisien korelasi item-total (*bivariate pearson*)

I = Skor item

X = Skor total

N = banyaknya subjek

Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

Jika r hitung $\geq r$ table, maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor, maka dinyatakan valid. Jika r hitung $< r$ table maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap total skor, maka dinyatakan valid.

3.6.2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Adapun pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Nunnally, 1994).

Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Suatu konstruk/ variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Nunnally, 1994)
- b. Suatu konstruk/ variabel dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $< 0,70$ (Nunnally, 1994)

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat.

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

Keterangan :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

r_{11} = reliabilitas yang dicari

n = Jumlah item pertanyaan yang di uji

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

σ^2 = varians total

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknainya sebagai berikut:

Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

3.7. Teknik Analisis Data

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu untuk menganalisis masalah penelitian tersebut akan menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan program software SPSS. Adapun teknik analisis yang digunakan sebagai berikut :

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskriptif mengenai variabel penelitian. Penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai distribusi dan penelitian yang memiliki kesamaan kategori dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi absolute yang menunjukkan rata-rata, median, deviasi standar, nilai maksimum, dan jumlah data penelitian. Menghitung rentang data dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang data} = \text{Nilai maksimum} - \text{nilai minimum} + 1$$

Menghitung panjang kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas}$$

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi kategori berdasarkan Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Rumus untuk mencari Mid an SDi adalah :

$$\text{Mean ideal (Mi)} = \frac{1}{2} (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$\text{Standard Deviasi (SDi)} = \frac{1}{6} (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan yang mendekati distribusi normal. Dengan demikian hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil metode yang lebih baik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal Al dan floating data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dari residual nya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogram nya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normal normalitas jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation factor* (FIVF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel dependen (terkait) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. (Gozali, 2016 dalam Anggit).

Tolerance mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cutoof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 maka terjadi multikolenieritas antar variabel independennya (Gozali, 2011 dalam Purwitasari (2013)).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Uji heteroskedastitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedostisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskadastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedostisitas atau diagram pencar (chart), dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

- a. Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka terjadi het-

eroskedastisitas.

- b. Jika ada pola-pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau diatas 0 dan y maka hal itu tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8. Pengujian Hipotesis

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuisisioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Analisis data menggunakan teknik statistik *multiple regression* untuk mengujipengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y = Mendeteksi kecurangan

a = Konstanta

b₁ b₂ = Koefisien

X₁ = Independensi

X₂ = Profesionalisme

e = Error

3.8.1. Uji t (Secara Parsial)

Menurut Purwitasri (2013) uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t untuk melihat besarnya pengaruh Independensi dan profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan . Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis yaitu :

- a. Menghitung besarnya t penelitian. Besarnya t penelitian terdapat pada hasil perhitungan spss.
- b. Menentukan tingkat signifikan sebesar = 5% atau = 0,05

c. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :

Ho ditolak jika $t \text{ statistic} < 0,05$ atau $t \text{ (hitung)} > t \text{ (tabel)}$

Ho diterima jika $t \text{ statistic} > 0,05$ atau $t \text{ (hitung)} < t \text{ (tabel)}$

3.8.2. Uji F (Secara Simultan)

Uji f merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung besarnya F penelitian. Besarnya F penelitian terdapat pada hasil perhitungan SPSS
- b. Menentukan tingkat signifikan sebesar 5% atau $= 0,05$
- c. Menentukan uji kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : Ho
ditolak jika $F \text{ statistik} < 0,05$ atau $F \text{ (hitung)} > F \text{ (tabel)}$ Ho
diterima jika $F \text{ statistik} > 0,05$ atau $F \text{ (hitung)} < F \text{ (tabel)}$

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (r^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$). Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen.